

---

**FLYPAPER EFFECT DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA  
PERIMBANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH**

**M. Alief Fahrizal<sup>1</sup>; Ni Made Sukartini<sup>2</sup>**  
Universitas Airlangga, Kota Surabaya<sup>1,2</sup>  
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan  
Email : fahrizalief90@gmail.com

**ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menganalisis gejala *flypaper effect* dari empat jenis dana transfer pemerintah pusat (DAU, DAK, DBH, Otsus) pada jenis Belanja Modal & Belanja Barang dan Jasa pada level kabupaten/kota di Aceh. Penelitian ini menggunakan realisasi APBD kabupaten/kota di Aceh tahun 2007 – 2020 yang dikumpulkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Teknis analisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan variabel dependen belanja modal dan barang jasa . Variabel bebas yang digunakan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terhadap belanja modal, terjadi *flypaper effect* pada DAU namun tidak terjadi pada ketiga dana transfer yang lain. Sedangkan terhadap belanja barang dan jasa tidak menunjukkan adanya *flypaper effect* pada ke-empat dana transfer. Meskipun pada sebagian besar dana transfer tidak ditemukan gejala *flypaper effect*, namun perlu menjadi catatan bahwa ternyata Dana Otsus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal & belanja barang jasa di Aceh. Hasil tersebut dapat menjadi fokus pemerintah untuk melakukan telaah lebih lanjut terhadap penggunaan Dana Otsus.

Kata kunci : Desentralisasi Fiskal; Dana Otonomi Khusus; *Flypaper Effect*

**ABSTRACT**

*"This study aims to analyze the flypaper effect from four types of central government transfer funds (DAU, DAK, DBH, Otsus) on Capital & Goods and Services Expenditure at the district/city level in Aceh. This study use district budget realization (APBD) in Aceh between 2007 – 2020 collected from the Directorate General of Fiscal Balance. This research uses multiple linear regression analysis with capital expenditure & goods and services expenditure as dependent variables. The independent variables used are General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), and Special Autonomy Funds (Otsus). This study dhow the result that for capital expenditure, there is a flypaper effect on DAU but not on the other three transfer funds. Meanwhile, for goods and services expenditure, there is no flypaper effect found on all four transfer funds. Although there is no flypaper effect symptomps found in most transfer funds, it should be noted that it turns out the Special Autonomy Funds do not have a significant effect on capital expenditure and goods and services expenditure in Aceh. This should be the focus of the government to further review the use of Special Autonomy Funds.*

Keywords : Fiscal Dezentralitation; Special Autonomy Fund; *Flypaper Effect*

## PENDAHULUAN

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya hampir dialami di seluruh negara berkembang, dari yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Ini adalah upaya untuk mengurangi ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemerintah, ketidakstabilan makroekonomi, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi, menurut Ginting (2019). Dalam hubungan sentralistik, peran yang sangat dominan dimiliki oleh pemerintah pusat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab kurang terlibat. Karena sulit untuk mengidentifikasi aspirasi daerah dan mengeksplorasi potensinya, pemerintah tidak dapat mendorong kemajuan daerah, terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Karena program-program yang dijalankan pemerintah pusat tidak sejalan dengan keinginan dan kemampuan daerah, terutama daerah yang jauh dari Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan, keragaman kondisi dan sumber daya daerah seringkali terabaikan.

Desentralisasi di Indonesia tidak hanya berlaku umum yang diterapkan di seluruh wilayah, tetapi juga bervariasi atau asimetris di beberapa wilayah. Kebijakan desentralisasi asimetris ini memberikan wilayah terkait lebih banyak wewenang untuk melakukan tugas tertentu. Dana transfer dari pemerintah pusat juga membantu. Memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu di suatu negara disebut desentralisasi asimetris, menurut Tauda (2018). Ini dilakukan untuk menjaga kesatuan daerah dalam NKRI dengan memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memperhitungkan karakteristik dan keistimewaan yang tidak berlaku seragam di setiap wilayah, desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi fungsi politik, ekonomi, dan fiskal. Papua, Papua Barat, Aceh, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah beberapa wilayah Indonesia yang memiliki desentralisasi yang asimetris. Semua provinsi memiliki kekhususan dan keistimewaan yang diatur oleh UU tersendiri. Kelima daerah yang disebutkan sebelumnya memiliki lebih banyak kebebasan dalam menjalankan pemerintahan daerah karena desentralisasi asimetris. Ini melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah salah satu jenis desentralisasi asimetris.

Salah satu tujuan utama dari transfer asimetris melalui otonomi khusus adalah untuk memastikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan

dengan pembangunan melalui rehabilitasi, penyelesaian konflik, dan rekonstruksi setelah konflik dengan harapan dapat menurunkan kemiskinan dan meningkatkan partisipasi pendidikan. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, kualitas layanan publik yang baik tidak dimiliki oleh Aceh, Papua Barat, dan Papua Barat. masalahnya adalah bagaimana dana transfer tersebut dapat sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan (Agustina et al., 2012).

Rani et al. (2010) menyatakan bahwa PAD digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Jumlah PAD menjadi ukuran pelayanan yang lebih baik, seberapa baik penyelenggaraan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena pada potensi yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendasarkan pembentukan daerah otonom. Setiap daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan peran PAD dalam komponen pendapatan daerah. Namun, sejauh ini, kontribusi PAD masih dikurangi oleh dana transfer; dengan kata lain, dana transfer masih merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan.

Pemerintah daerah yang cenderung bergantung pada dana transfer menimbulkan beberapa konsekuensi yang merugikan bagi pemerintah daerah. Kartika (2015) mengatakan bahwa ketergantungan tinggi pada dana transfer pemerintah pusat menyebabkan kurangnya upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi lokal ketika terjadi krisis. Akibatnya, ekonomi lokal juga merosot saat terjadi krisis atau kontraksi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa respon yang berbeda terhadap dana transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak dan retribusi) dimiliki oleh pemerintah daerah. Respon yang dimaksud adalah stimulasi atas belanja tidak sama dengan stimulasi dari pendapatan daerah ketika penerimaan daerah berasal dari transfer. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan belanja daerah yang tidak proporsional dan berlebihan. Oates juga menyatakan bahwa efek flypaper terjadi ketika respons (belanja) daerah terhadap transfer lebih besar daripada pendapatannya sendiri. Studi sebelumnya, seperti Afrizawati (2012), Kuncoro (2004), dan Widarjono (2006), menemukan efek flypaper pada keuangan daerah di Indonesia sebagai respon belanja daerah pada perubahan DAU lebih besar daripada PAD.

Teori bantuan pemerintah tak bersyarat menyatakan pengeluaran untuk barang publik dapat ditingkatkan oleh transfer pemerintah pusat, namun pajak daerah tidak

dapat digantikan. Teori tersebut mengalami penyimpangan hingga terciptalah konsep *flypaper effect*. Sebagaimana dinyatakan oleh Sagbas dan Saruc (2008), Dua teori utama yang sering digunakan untuk melihat sumber *flypaper effect* adalah teori ilusi pajak dan teori model birokrasi. Teori ilusi pajak mengatakan bahwa sumber efek *flypaper* terjadi karena penduduk setempat tidak tahu atau tidak peduli tentang pembiayaan dan pembelanjaan pemerintah daerah, dan kesalahan persepsi ini menyebabkan keputusan yang salah. Teori model birokrasi sebagai sumber mengemukakan bahwa *flypaper effect* muncul karena dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah cenderung sangat bergantung.

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Legrenzi dan Milas (2001) dalam (Maimunah & Akbar, 2008), efek *flypaper* adalah penyimpangan dalam perilaku rasional apabila transfer disangka sebagai bagian dari pendapatan pemerintah daerah (seperti pajak daerah) dan seharusnya digunakan dengan jumlah yang sama. Namun, karena lebih banyak dana ditransfer ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah terus membelanjakan lebih banyak. Kondisi seperti yang disebutkan di atas adalah ketika efek *flypaper* terjadi pada pengeluaran pemerintah daerah.

Tanjung et al. (2021) menyelidiki cara untuk menilai efek *flypaper* pada area otonom. Studi ini memvalidasi teknik analisis efek *flypaper* dengan menggunakan regresi data panel pada 210 daerah otonomi di Indonesia tahun 1999-2021. Untuk melakukan analisis efek *flypaper* untuk daerah otonom, metode pemilihan model BLUE digunakan. Proses ini melibatkan pemilihan model FEM, REM, atau PLS. Model FEM dan PLS harus memenuhi kriteria model BLUE, jika tidak, proses GLS akan digunakan. Selanjutnya, koefisien regresi dibandingkan antara DAU dan belanja daerah untuk mengetahui apakah efek *flypaper* lebih baik atau buruk.

Zulfan dan Maulana pada tahun 2019 melakukan penelitian tentang efek *flypaper* pada provinsi Aceh dengan melihat dana dana otonomi khusus dan alokasi umum. Analisis data panel digunakan untuk menghitung persamaan regresi antara variabel dependen, yaitu belanja daerah, dan variabel independen, yaitu PAD, DAU, OTSUS, dan variabel lag menggunakan regresi data panel. Menurut hasil penelitian, mayoritas daerah di Aceh tidak mengalami efek *flypaper* berdasarkan ukuran DAU, tetapi mengalami efek *flypaper* berdasarkan ukuran Otsus. Hasil tersebut menunjukkan

daerah di Aceh lebih bertumpu pada dana Otsus daripada DAU atau PAD untuk membiayai belanja mereka.

Studi yang dilakukan oleh Ginting pada tahun 2019 dengan judul "Analisis Efek Flypaper pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara" menemukan pengaruh dana perimbangan, atau efek flypaper, lebih besar daripada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Abdullah et al. pada tahun 2018 meneliti bagaimana pemerintah daerah menggunakan dana transfer pusat di tujuh kabupaten di Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah cenderung membelanjakan sesuai dengan anggaran pusat untuk kepatuhan peraturan, tetapi anggaran tersebut belum digunakan secara efektif. Kemampuan pemerintah daerah untuk menentukan kegiatan dan belanja yang signifikan adalah masalah terbesar. Sektor kesehatan, pendidikan, dan modal dapat sangat dipengaruhi oleh penganggaran pemerintah, tetapi kualitas belanja pemerintah harus diperhatikan agar hasilnya lebih dari angka penyerapan.

Firdaus et al. (2021) meneliti dampak desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi serta penurunan kemiskinan di Aceh. Dalam penelitian ini, empat instrumen dana transfer, yaitu DBH, DAU, Dana Otsus, diuji pengaruhnya terhadap belanja modal & barang dan jasa pemerintah daerah Aceh. Selanjutnya, instrumen tersebut diuji terkait dengan pertumbuhan PDB dan pengentasan kemiskinan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hasilnya, dari tahun 2014 hingga 2018, Dana Otsus menjadi sumber pendapatan terbesar dalam APBD Aceh dengan rata-rata 60% dari pendapatan. Hasil analisis panel data menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal membantu menurunkan tingkat pengeluaran pemerintah. Pengeluaran barang dan jasa lokal secara signifikan dipengaruhi oleh beberapa komponen transfer fiskal antar pemerintah, seperti DBH dan DAK. PAD, sebagai kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan mereka sendiri, juga mempengaruhi belanja barang dan jasa lokal. Meskipun demikian, masing-masing faktor memiliki dampak yang signifikan pada belanja modal pemerintah daerah. DBH adalah satu-satunya yang berdampak negatif pada belanja modal, sedangkan lainnya, seperti DAU, DAK, PAD, dan Otsus, berdampak positif pada belanja modal lokal. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana desentralisasi fiskal berdampak pada kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi. Analisis menunjukkan bahwa

desentralisasi fiskal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan menunjukkan belanja pemerintah daerah untuk barang dan jasa meningkatkan PDB daerah. PMTB dan dana Otkas, dua variabel lain, juga berdampak positif pada PDB lokal. Dalam hal dampak pada kemiskinan, analisis menunjukkan bahwa dana Otsus mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi hanya sedikit. Selain itu, peningkatan kemampuan PDB daerah (PDRB) dan pemerintah daerah untuk mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) telah ditunjukkan sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam penelitian Yushkov (2015), menunjukkan pengeluaran pemerintah daerah di Rusia sangat terdesentralisasi serta berhubungan hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah hanya memainkan peran sebesar 50% dari porsi penerimaan daerah, dan pemerintah pusat memberikan sisa 50%.

Siburian (2022) menyelidiki bagaimana desentralisasi fiskal berdampak pada kemiskinan pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan data dari tahun 2001 hingga 2018, Siburian mengukur desentralisasi dengan menggunakan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, sedangkan kemiskinan diukur dengan persentase kemiskinan dan tingkat kedalaman kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara desentralisasi fiskal dan pengentasan kemiskinan. Karena memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan yang berbeda yang tidak dapat ditangani secara konsisten dalam sistem terpusat, desentralisasi fiskal membantu mengurangi kemiskinan. Desentralisasi fiskal juga memungkinkan masyarakat lokal untuk memiliki kendali langsung atas cara pemerintah daerah menggunakan sumber daya. Akibatnya, pemerintah daerah lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengatasi kemiskinan di daerah tersebut. Acosta dan Loza (2001) (dalam Ginting, 2019) mengemukakan flypaper effect terjadi dalam kondisi sebagai berikut, yaitu perubahan pendapatan daerah mengakibatkan perubahan belanja pemerintah daerah harus positif ( $\partial Y / \partial G > 0$ ). Kedua, perubahan dana perimbangan mengakibatkan perubahan belanja pemerintah daerah harus positif ( $\partial Y / \partial F > 0$ ). Terakhir, terjadinya flypaper effect adalah ketika pendapatan asli daerah memiliki pengaruh lebih kecil daripada dana perimbangan ( $(\partial Y / \partial G) < (\partial Y / \partial F)$ ). Berdasarkan model dalam penelitian ini, flypaper effect terjadi apabila:

- i. Nilai  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 > 0$

ii. Nilai  $\beta_1 < \beta_2, \beta_3, \beta_4$

Penelitian ini fokus pada perbandingan pengaruh antara perubahan PAD dan Dana Otsus, DAU, DAK, DBH terhadap perubahan Belanja Modal & Belanja Barang Jasa sebagai asumsi penentuan terjadinya *flypaper effect*.

### METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini berfokus pada 23 pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh selama rentang tahun 2007 sampai dengan tahun 2020. Pada penelitian ini, variabel dependen meliputi belanja modal & belanja barang jasa serta variabel bebas yang digunakan meliputi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Otsus dengan regresi linear berganda untuk analisis. *Flypaper effect* dilihat dengan koefisien PAD yang dibandingkan dengan koefisien DAU, DAK, DBH, dan Otsus. Model analisis penelitian disusun sebagai berikut:

#### Model 1

$$\ln BM_{it} = \gamma_0 + \delta_1 \ln PAD_{it} + \delta_2 \ln DAU_{it} + \delta_3 \ln DAK_{it} + \delta_4 \ln DBH_{it} + \delta_5 \ln OTSUS_{it} + \mu_{it}$$

#### Model 2

$$\ln BBJ_{it} = \theta_0 + \rho_1 \ln PAD_{it} + \rho_2 \ln DAU_{it} + \rho_3 \ln DAK_{it} + \rho_4 \ln DBH_{it} + \rho_5 \ln OTSUS_{it} + \pi_{it}$$

Keterangan:

<i>BD</i>	= Belanja Daerah
<i>BM</i>	= Belanja Modal
<i>BBJ</i>	= Belanja Barang dan Jasa
<i>PAD</i>	= Pendapatan Asli Daerah
<i>DAU</i>	= Dana Alokasi Umum
<i>DAK</i>	= Dana Alokasi Khusus
<i>DBH</i>	= Dana Bagi Hasil
<i>OTSUS</i>	= Dana Otonomi Khusus
$\gamma_0$	= Konstanta model 2
$\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5$	= Parameter koefisien regresi model 2
$\mu_{it}$	= Error term model 2
$\theta_0$	= Konstanta model 3
$\rho_1, \rho_2, \rho_3, \rho_4, \rho_5$	= Parameter koefisien regresi model 3
$\pi_{it}$	= Error term model 3
<i>i</i>	= Banyaknya kabupaten/kota
<i>t</i>	= Banyaknya tahun



### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Dana Otsus mulai diberikan di Aceh pada tahun 2008 sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otsus diberikan selama dua puluh tahun. Setara dua persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional untuk tahun pertama hingga kelima belas, dan setara dengan satu persen dari DAU nasional untuk tahun keenam belas hingga kedua puluh. Dana Otsus Aceh dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada wilayah dalam hal pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dan pembiayaan untuk layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam hal penggunaan dana Otsus, UU Nomor 11 tahun 2006 menetapkan bahwa tambahan pendapatan SDA Migas harus dialokasikan sebesar paling sedikit 30% untuk pembangunan pendidikan dan sebesar paling banyak 70% untuk Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh menyepakati bersama program pembangunan. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 menetapkan bahwa penggunaan dana Otsus harus diprioritaskan untuk pembangunan, terutama: (1) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; (2) pemberdayaan ekonomi rakyat; (3) pengentasan kemiskinan; (4) pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, serta (5) pelaksanaan keistimewaan Aceh. Selain itu, dana Otsus dapat digunakan untuk pendanaan program/kegiatan bersama, yang antara lain meliputi beasiswa, jaminan kesehatan, rumah layak huni, bantuan anak yatim, serta kegiatan lainnya yang ditetapkan Gubernur.

Uji F statistik menunjukkan  $Prob > F = 0.0000$  pada model 1 dan model 2 yang menunjukkan variabel PAD, DAU, DAK, DBH, Otsus secara simultan mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa, serta model regresi mampu memprediksi variabel terikat.

Secara umum, hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa PAD kabupaten/kota di Aceh berpengaruh signifikan dan lebih besar dibandingkan dengan variabel DAU, DAK, DBH, dan Otsus baik pada belanja modal maupun belanja barang jasa. Perbandingan hasil uji t-statistik ditunjukkan pada tabel 2.

Dilihat dari variabel Belanja Modal, tidak terjadi flypaper effect di Aceh ditinjau dari DAU, DAK, DBH, dan Otsus. Peningkatan PAD, DAK, dan DBH Aceh berkontribusi terhadap peningkatan belanja modal di Aceh kecuali Otsus yang tidak



memberikan pengaruh signifikan, namun pengaruh peningkatan PAD Aceh terhadap belanja modal lebih besar dibandingkan dengan pengaruh peningkatan DAU, DAK dan DBH. DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal yang artinya kenaikan DAU sebesar 1 satuan menurunkan belanja modal sebesar 0,398 satuan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian Aceh sudah baik atau dengan kata lain ketergantungan Aceh terhadap dana transfer yang digunakan untuk belanja modal tidak tinggi, namun perlu telaah lebih lanjut terhadap penggunaan dana otonomi khusus yang tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pada dari variabel Belanja Barang dan Jasa, tidak terjadi *flypaper effect* di Aceh ditinjau dari DAU, DAK, DBH, dan Otsus. Peningkatan PAD, Otsus, dan DBH Aceh berkontribusi terhadap peningkatan belanja barang dan jasa di Aceh sedangkan DAU yang tidak memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh peningkatan PAD Aceh terhadap peningkatan belanja barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pengaruh peningkatan DAU, Otsus dan DBH. Artinya peruntukan DBH tidak difokuskan pada belanja barang dan jasa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian Aceh sudah baik atau dengan kata lain ketergantungan Aceh terhadap dana transfer yang digunakan untuk belanja barang dan jasa tidak tinggi.

### KESIMPULAN

Tidak ditemukannya *flypaper effect* pada realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Aceh merupakan indikator baik yang menandakan bahwa ketergantungan kabupaten/kota di Aceh terhadap dana transfer tidak tinggi. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa PAD kabupaten/kota di Aceh memiliki cukup kemampuan untuk menunjang belanja modal & belanja barang jasa. Meskipun demikian, ditemukan bahwa Dana Otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal & belanja barang jasa. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus karena dari dua jenis belanja yang memiliki persentase besar dalam porsi belanja daerah ternyata tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari Dana Otsus. Pengawasan ini perlu agar penggunaan Dana Otsus bisa lebih tepat guna sesuai dengan tujuannya.

Bagi penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan dengan lebih mengeksplorasi macam-macam komponen belanja daerah untuk mengetahui secara lebih tepat penggunaan dana otonomi khusus dan dana transfer.

### PENGHARGAAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atas dukungannya dalam membiayai pendidikan magister peneliti dan pelaksanaan penelitian.

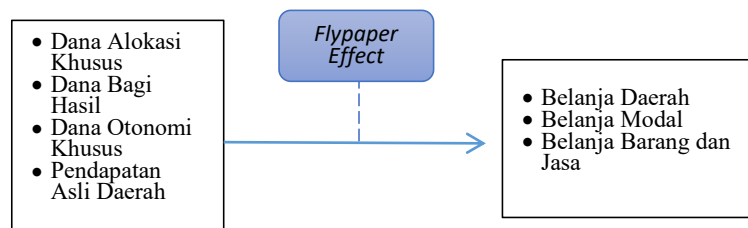
### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Junita, A., Fahlevi, H., Rosa, I. D., & Meutia, R. (2018). Intervention of Central Government in Local Government Budgeting Through Financial Regulations (A Case of Indonesia). *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), 1283–1291.
- Abilawa, M. S. (2010). *Studi Determinan Karakteristik Rumah Tangga Miskin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Data SUSENAS)*. Universitas Indonesia.
- Abrar, M., Juanda, B., Firdaus, M., & Hakim, B. D. (2018). The effect of special autonomy funds on economic growth and income inequality in Aceh province. In *Journal of Applied Economic Sciences: Vol. XIII* (Issue 61). Winter.
- Abrar, M., Juanda, B., Firdaus, M., & Hakim, D. B. (2020). The Impact of Special Autonomy Funds on Poverty of Human Development and Unemployment in Aceh. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(10).
- Afrizawati. (2012). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*, 21–30.
- Agustina, C. D., Ahmad, E., Nugroho, D., & Siagian, H. (2012). Political Economy of Natural Resource Revenue Sharing in Indonesia. In *ASIA Research Centre Working Paper 55* (55).
- Aronson, J. R. (1985). *Public Finance*. Mc-Graw Hill Companies.
- Bartolucci, S., Guerzoni, M., & Zago, A. (2015). The Impact of Fiscal Decentralization on Local Communities: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Studies*, 51(11), 1630–1644.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2000). *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang: Tinjauan Umum, dal.* PT Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, I., Nuryartono, N., & Barreto, R. (2021). Impact of Fiscal Decentralisation on Economic Growth and Poverty Reduction in Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, 176–185. <https://doi.org/10.32628/ijrsrset218130>
- Freinkman, L., & Plekhanov, A. (2009). Fiscal Decentralization in Rentier Regions: Evidence from Russia. *World Development*, 37(2), 503–512. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.05.010>
- Ginting, A. M. (2019). Analisis Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Utara. *Kajian*, 24(2), 113–130. <https://doi.org/10.1016/S0305>
- Gujarati. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2001). ANGGARAN DAERAH DAN “FISCAL STRESS” (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* (Vol. 16, Issue 4).
- Inman, R. P. (2008). *The Flypaper Effect* (NBER WORKING PAPER SERIES 14579).
- Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 113–131.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).

- Kadmasasmita, A. D. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi*. STIA LAN.
- Kartika, M. (2015). Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 45–71.
- Kuncoro, H. (2004). Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 47–63.
- Lisna, V. (2014). *Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Perekonomian dan Kemiskinan Sektoral Daerah di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. Institut Pertanian Bogor.
- Maimunah, M., & Akbar, R. (2008). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *The Indonesian Journal of Accounting*, 11(1).
- Nurhayati, & Wicaksono, A. (2017). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2016. *Jurnal Media Ekonomi*, 25(1), 65–74.
- Pujiati, A. (2006). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 61–70.
- Rani, F. A., Syahbandir, M., & Purnama, E. (2010). Kontribusi PAD dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *KANUN*, 51, 235–255.
- Saputri, H. M., & Pandoyo. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Ekbank*, 3(2).
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty - Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2000). *Economics of The Public Sector* (J. Repcheck, Ed.). W. W. Norton & Company.
- Suryani, & Hendrayadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
- Tanjung, A. H., Salam, S., Rusdi, J. F., Ermawati, Y., Novianty, I., Hendaris, R. B., & Apriliawati, Y. (2021). Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. *Methods X*, 8.
- Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(4), 413–435.
- Widarjono, A. (2006). Does Intergovernmental Transfers Cause Flypaper Effect on Local Spending? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 115–123.
- Yushkov, A. (2015). Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience. *Russian Journal of Economics*, 1, 404–418. <https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004>
- Zulfan, T., & Maulana, H. (2019). Gejala flypaper effect di Provinsi Aceh ditinjau dari Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. *INOVASI*, 15(2), 188–197. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat

Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

### GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Pikir

Tabel 1. Persentase Dana Transfer dan PAD dalam Pendapatan Daerah

Provinsi	% DAU terhadap Pendapatan Daerah	% DAK terhadap Pendapatan Daerah	% DBH terhadap Pendapatan Daerah	% OTSUS terhadap Pendapatan Daerah	% PAD terhadap Pendapatan Daerah
Aceh	45,30%	11,41%	7,06%	36,23%	12,72%
Papua	52,09%	10,67%	7,87%	29,37%	5,35%
Papua Barat	41,48%	8,82%	19,62%	30,08%	4,31%

Sumber: Data Realisasi APBD T.A. 2007-2020 DJPK diolah

Tabel 2. Hasil Uji Statistik

VARIABLES	(1) BM	(2) BBJ
lnPAD	0.386*** (0.0522)	0.395*** (0.0411)
lnDAU	-0.398*** (0.141)	0.170 (0.111)
lnDAK	0.354*** (0.0488)	0.161*** (0.0385)
lnDBH	0.143** (0.0675)	-0.110** (0.0526)
lnOTSUS	0.0172 (0.0221)	0.000165 (0.0174)
Constant	14.19*** (3.337)	10.00*** (2.619)
Observations	266	268
R-squared	0.710	0.841
Prob > F	0.0000	0.0000
Number of KabKota	23	23

Standard errors in parentheses  
\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1